

Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kemajuan Teknologi Guna Perkembangan Literasi Media Digital di Indonesia

Implementation of Character Education Policy Toward the Improvement of Human Resources Capacity and Technology Advancement in the Development of Digital Media Literacy in Indonesia

B. Felicia Andries¹ dan Ririt Yuniar²

¹ Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
Email: feliandries@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
Email: rirityuniar@gmail.com

Abstrak

Pendidikan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi. Sehingga dapat tercipta sumber daya manusia yang berkompeten. Artikel ini menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam mencapai sumber daya manusia yang mapan, proses komunikasi dalam meningkatkan kemampuan literasi sangat diperlukan. Sinergitas diantara seluruh elemen masyarakat perlu diciptakan agar perkembangan teknologi dapat diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik.

Kata kunci: pendidikan karakter, sumber daya manusia, komunikasi, literasi media digital.

Abstract

Education becomes an important part in the process of human resources developing in Indonesia. Through education, society can understand and implement their sciences to facing technological development. So, that will be created competent human resources. This article explains the importance of character education in the face of industrial revolution 4.0. In achieving established human resources, the communication process in improving literacy skills is very much needed. Synergy between all elements of society needs to be created so that technological development can be balanced with literacy skills.

Keywords: character building, human resources, communication, media digital literacy.

1. Pendahuluan

Dinamika terjadi pada setiap peradaban, karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi, setiap individu perlu melakukan usaha untuk mengembangkan potensi diri. Pengembangan potensi diri dimulai sejak manusia baru diberikan pemahaman mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat melalui lingkungan keluarga. Proses pengembangan diri manusia berlanjut sampai ke tahapan pembentukan karakter – yang dalam hal ini dapat terjadi melalui proses sosialisasi. Dalam meningkatkan potensi diri, setiap individu perlu untuk menerima dan melakukan kegiatan pendidikan formal melalui lembaga pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu metode yang digunakan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kata lain, pendidikan memiliki tujuan yang berkelanjutan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pengembangan tersebut dapat terjadi apabila masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional pernah menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan dalam kehidupan anak-anak. Pendidikan akan menuntun peserta didik menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai nilai kehidupan yang setinggi-tingginya. Sehingga, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk tercapainya Indonesia maju.

Pada setiap jenjang pendidikan, terdapat dasar ilmu yang berbeda. Salah satu kemampuan mendasar yang membedakan setiap jenjang tersebut adalah kemampuan literasi. Pada era revolusi industri 4.0 ini, Pemerintah melalui Menristekdikti telah menentukan kemampuan literasi yang harus dipenuhi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dua diantara rumusan tersebut adalah kemampuan untuk literasi data dan literasi teknologi, yang tidak lain merupakan faktor pendukung dapat tercapainya kemampuan literasi media dan digital di era industri 4.0. Namun, pemerataan akses pendidikan di Indonesia belum terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan kemampuan literasi.

Salah satu peristiwa yang terjadi karena kesenjangan kemampuan literasi adalah penyebaran berita bohong yang massif di media sosial. Lebih tepatnya, terjadi karena kemampuan literasi media digital dalam masyarakat yang masih rendah. Tidak jarang kaum intelektual pun dapat terpengaruh berita bohong karena keterkaitan emosi yang berlebihan. Hal tersebut menjadi masalah yang cukup kompleks karena pengetahuan dan kemampuan dasar penggunaan teknologi di masyarakat memiliki jarak yang jauh dengan perkembangan teknologi masa kini. Pendidikan karakter, etika, dan pengetahuan dalam hal ini perlu dikupas tuntas karena mencakup strategi komunikasi yang fokus kepada pengembangan masyarakat melalui komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Peningkatan pemahaman publik mengenai pentingnya literasi media digital perlu dikembangkan. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penulis dalam melihat keseimbangan kapasitas SDM dengan kemajuan teknologi terhadap perkembangan literasi media digital di Indonesia saat ini.

2. Pembahasan

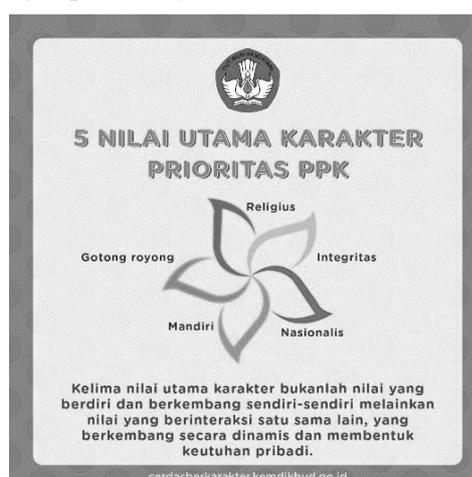
Kemampuan untuk melakukan literasi merupakan salah satu wujud sumber daya manusia yang sudah mapan. Donni Juni Priansa (2016) menjelaskan bahwa prinsip pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah peningkatan kualitas, kuantitas, maupun kemampuan kerja individu untuk mengemban tugasnya di masa yang akan datang. Pembangunan di dunia telah berorientasi pada sumber daya manusianya. Jika setiap individu – terutama masyarakat Indonesia – telah mencapai kemampuan dasar untuk melakukan literasi media secara digital, maka masyarakat Indonesia telah siap untuk menghadapi era industri 4.0. Pembahasan dalam tulisan ini akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan karakter sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi era industri 4.0. Dalam hal ini menyangkut persoalan bagaimana mengkomunikasikan strategi-strateginya dan upaya mengatasi kesenjangan terhadap pesatnya kemajuan teknologi sehingga literasi media digital perlu dikembangkan.

Pendidikan Karakter Fondasi Peningkatan Sumber Daya Manusia

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, yang juga disampaikan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, tujuan dari muatan pendidikan Pancasila adalah untuk membuat peserta didik dapat berpikir secara nasionalis dan dinamis. Setiap individu yang dibentuk dalam proses pendidikan di Indonesia akan memiliki karakter Pancasila sebagai cerminan bangsa. Pendidikan di Indonesia tidak lagi hanya terfokus pada nilai akademik, melainkan pengembangan karakter.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menentukan karakter yang diharapkan dari pendidikan di Indonesia sejak dini. Era revolusi industri 4.0 ini telah menggeser ekosistem lama, dimana peserta didik hanya menerima pengetahuan dari tenaga pendidik. Saat ini Kemdikbud telah mengembangkan sistem baru yang mendorong peserta didik untuk menjadi lebih aktif. Sehingga karakter peserta didik yang nasionalis, religius, berintegritas, mandiri, dan memiliki semangat gotong royong dapat terwujud.



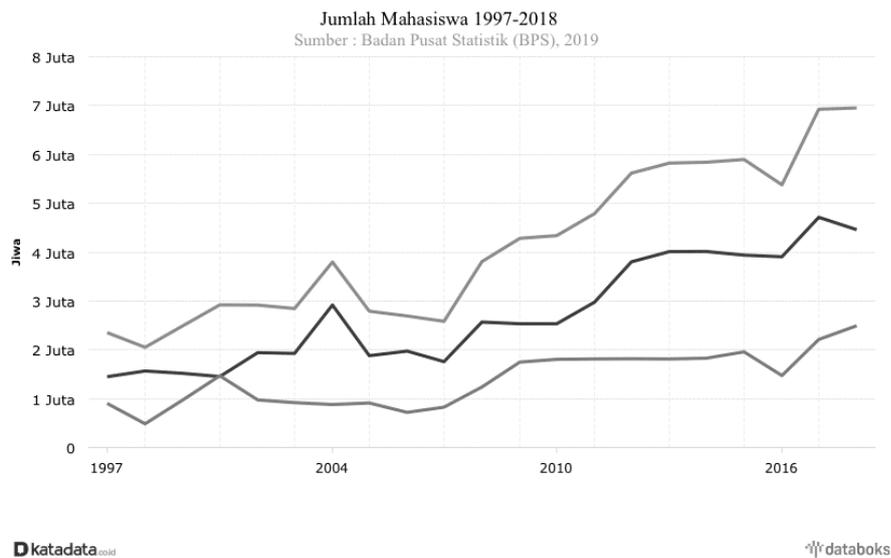
Karakter Prioritas Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

(sumber: <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/7bdf2592741007e>)

Pembentukan dan pengembangan karakter yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tentunya searah dengan tujuan negara Indonesia. Dalam rangka mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia di revolusi industri 4.0 tersebut, selain Kemdikbud, Kemristekdikti juga telah menentukan dan menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) bagi peserta didik. Capaian pembelajaran yang dibentuk tentunya berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap masa. Pada era ini, Kemristekdikti fokus terhadap empat kemampuan dasar yang harus dimiliki para lulusan perguruan tinggi. Tiga nilai diantaranya menekankan kemampuan literasi.

Kemampuan literasi yang ditekankan saat ini lebih kepada kemampuan literasi media digital. Kemampuan pertama dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah mengenai literasi data. Literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan data informasi (*big data*) di dunia digital. Selanjutnya, kemampuan literasi teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan mesin, dan aplikasi teknologi. Sedangkan literasi manusia adalah kemampuan pemahaman mengenai nilai kemanusiaan, komunikasi, dan desain. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dengan jenjang tertinggi, mengharuskan peserta didik untuk dapat memiliki kemampuan literasi tersebut. Kurikulum yang digunakan menyesuaikan agar tercapainya kemampuan yang diharapkan. Yaitu pentingnya sinkronisasi antara literasi data, literasi media, literasi teknologi dan literasi manusia.

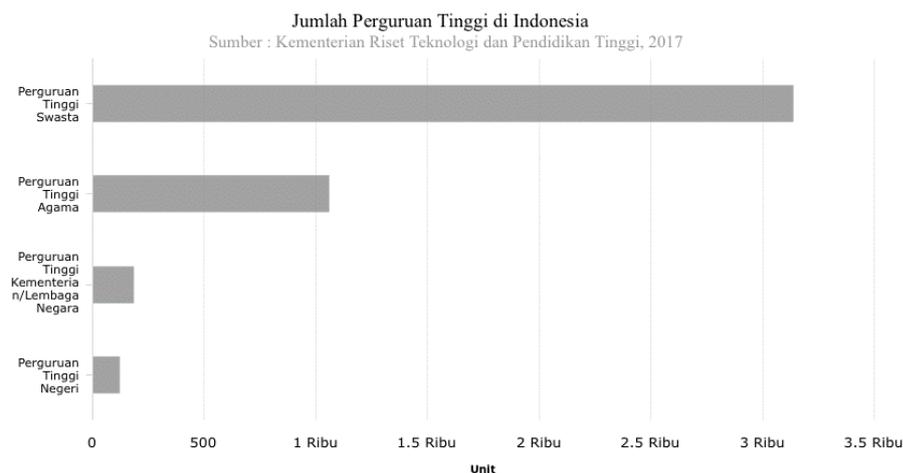
Namun dalam mencapai tujuan tersebut, masih disayangkan bahwa pendidikan di Indonesia belum dapat berjalan maksimal. Persentase mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia menurut Menristekdikti pada tahun 2018 hanya mencapai 7,5 juta. Sedangkan tingkat populasi usia 19-23 tahun mencapai angka 80 hingga 107 juta.



Jumlah Mahasiswa di Indonesia 2018

(sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/tertinggi-sejak-1997-jumlah-mahasiswa-indonesia-2018-capai-7-juta-jiwa>)

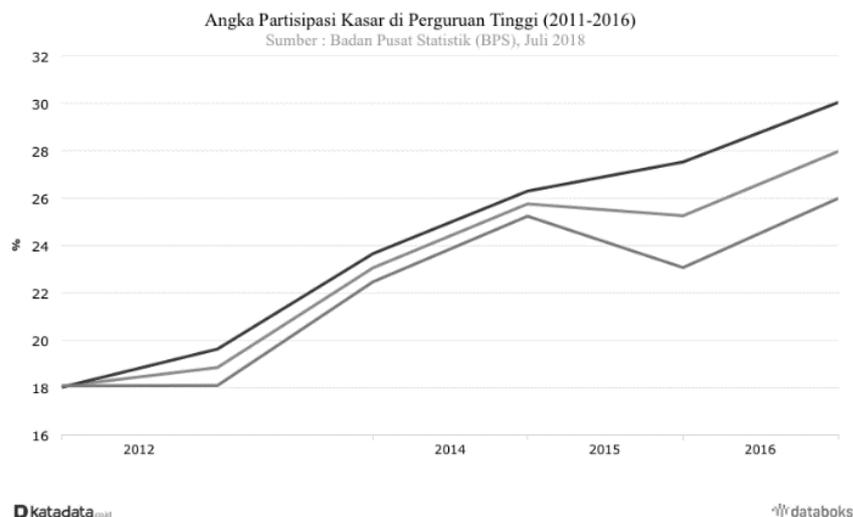
Menurut data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 lalu juga menemukan kesimpulan bahwa angka putus sekolah tegak lurus dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti) pada tahun 2017, jumlah perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit. Angka ini didominasi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai 3.136 unit. Sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi unit paling sedikit, yakni 122 unit. Sisanya adalah perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan.



Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2017

(sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia>)

Namun demikian, jumlah tersebut masih tidak sebanding dengan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Tanah Air. APK Indonesia berada di kisaran 31,5 persen. Kondisi ini membuat banyak PTS yang mempunyai mahasiswa kurang dari 500 dan membuat kondisi PTS tersebut tidak sehat. Disisi lain, tingginya minat calon mahasiswa pada PTN yang notabene menghadirkan kuliah dengan biaya lebih terjangkau masih belum mampu tertampung seluruhnya karena minimnya perguruan tinggi negeri.



Angka Partisipasi Kasar di Perguruan Tinggi Tahun 2011-2016

(sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/13/meski-masih-rendah-partisipasi-perguruan-tinggi-menunjukkan-peningkatan>)

Berdasarkan data-data yang ditampilkan, minat terhadap pendidikan di Indonesia memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga memerlukan pembangunan sumber daya manusia melalui aspek pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Indonesia secara adil dan merata.

Komunikasi Pembangunan Sebagai Salah Satu Strategi

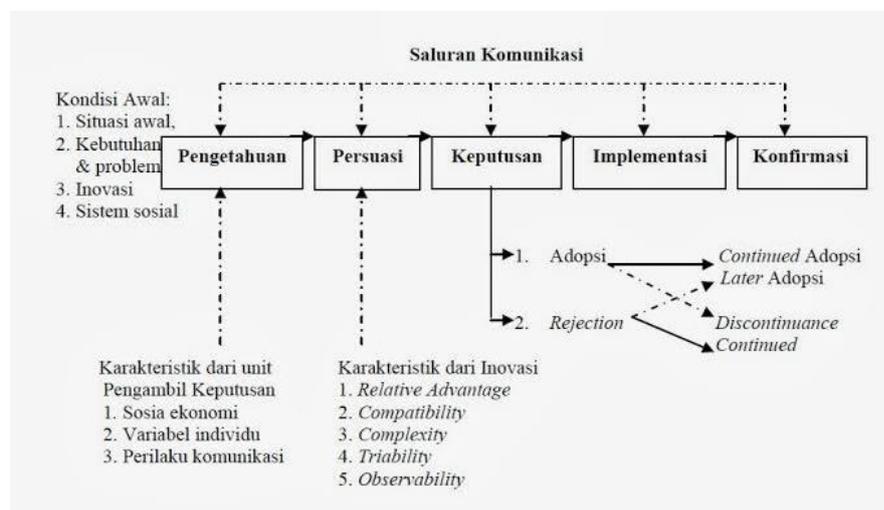
Komunikasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari komunikator kepada komunikan. Dilla (2007) menjelaskan komunikasi

pembangunan dalam artian sempit merupakan upaya yang dilakukan dalam penyampaian ide dan keterampilan pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas agar kegiatan tersebut dapat dipahami, diterima dan masyarakat dapat terlibat aktif dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan. Melalui penjelasan tersebut, komunikasi pembangunan menjadi penting karena melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan di berbagai aspek.

Salah satu strategi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah melalui pendidikan. Sehingga, contoh nyata dari pelaksanaan komunikasi pembangunan dapat terbukti dengan hadirnya kelompok pegiat literasi media. Kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan tinggi telah muncul sebagai agen perubahan sosial yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dibuktikan dengan terbentuknya dua komunitas yang bergerak dalam kegiatan literasi digital, yaitu Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI) dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Kedua komunitas tersebut memiliki fokus yang sama dalam melakukan kegiatan literasi digital terhadap masyarakat. Hal ini sebagai salah satu wujud proses komunikasi yang dapat dijadikan strategi dalam penyampaian keberhasilan pengembangan literasi.

JAPELIDI memiliki kegiatan berupa penelitian, pengabdian, dan publikasi tentang literasi digital. JAPELIDI melihat pentingnya literasi digital karena maraknya penyebaran *hoax* dan *cyber bullying* yang terjadi di Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Sehingga JAPELIDI dibentuk untuk menyebarkan gerakan literasi digital dengan membawa nilai keberagaman sebagai fitrah bangsa Indonesia. Selain JAPELIDI, MAFINDO juga merupakan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kegiatan literasi digital bagi masyarakat. Kegiatan literasi digital tersebut berupa *training*, *workshop*, *debunking*, dan kampanye publik. Terbentuknya MAFINDO juga didasari keresahan masyarakat mengenai penyebaran *hoax* yang marak di Indonesia.

Nilai yang dibawakan JAPELIDI dan MAFINDO berkaitan dengan inovasi yang mengarah pada perubahan nilai positif yang ada dalam masyarakat. Rogers (2003) dalam teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana penyebaran ide baru ke dalam sistem sosial atau populasi.



Model Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003)

Melalui tabel tersebut, terdapat kesesuaian antara teori dan realitas. Dimulai dari proses pemberian pemahaman serta persuasi mengenai pentingnya literasi digital dalam era industri 4.0 kepada masyarakat. Setelah memahami pentingnya hal tersebut, masyarakat akan mulai untuk menentukan apakah literasi media digital benar penting atau tidak. Sampai dimana waktu ketika masyarakat mau untuk menerima kegiatan literasi model baru sesuai dengan perkembangan zaman dan mengimplementasi nilai tersebut. Sehingga, telah terjadi implementasi dari pengetahuan baru yang didapat oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih

berlangsungnya kegiatan literasi media digital yang dilakukan oleh JAPELIDI dan MAFINDO. Masyarakat yang tadinya enggan untuk mengikuti kegiatan literasi digital – terutama dewasa akhir – pada akhirnya melihat kegiatan tersebut sebagai hal yang penting dan perlu untuk didukung.

Literasi Media Digital dan Pengembangannya Sebagai Sebuah Jawaban

Capaian nilai yang diinginkan dengan skala nasional tentunya akan sulit jika hanya segelintir individu yang mendapatkan kesempatan untuk mencapai kemampuan literasi yang dimaksud. Kesenjangan angka yang cukup jauh dapat membuat berbagai macam ketimpangan dalam masyarakat untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Jumlah perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia tidak sebanding dengan jumlah populasi yang ada.

Silalahi (2000: 249) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah upaya berkesinambungan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan. Sesuai dengan yang disampaikan, bahwa pendidikan merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Sehingga setiap warga negara Indonesia dalam mengembangkan potensinya, perlu untuk mendapat akses pendidikan.

Walaupun akses pendidikan masih belum merata, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berhenti pada tataran insititusi pendidikan saja. Seperti yang disampaikan Silalahi (2000), bahwa latihan dan pembinaan untuk masyarakat juga merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia. Kemampuan literasi media digital adalah bagian dari latihan dan pembinaan untuk masyarakat. Menurut Alan Rubin (1998), kemampuan literasi media digital merupakan penggabungan dari beberapa definisi literasi media seperti pemahaman sumber dan teknologi dari komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang diproduksi dan pemilihan, penafsiran, serta dampak dari suatu pesan.

Organisasi masyarakat sipil seperti JAPELIDI dan MAFINDO – yang terdiri dari akademisi – telah berdinamika bersama masyarakat dan menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam meningkatkan kepeahaman masyarakat Indonesia terhadap kemajuan teknologi, gerakan literasi media digital dapat diperluas oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Untuk mengembangkan gerakan literasi media digital dapat dimulai dengan membentuk kurikulum literasi media digital bagi institusi pendidikan, selain itu dapat melakukan gerakan akar rumput ke daerah yang belum mengenal apa itu literasi media digital. Pengembangan literasi tersebut juga dapat dimulai dari memberikan sosialisasi kepada pemuda/i daerah yang terafiliasi dalam Karang Taruna dan sejenisnya, serta Ibu Rumah Tangga yang terafiliasi dalam kegiatan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tentunya perlu dilakukan secara longitudinal dan dilakukan monitoring serta evaluasi.

3. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Pendidikan sebaiknya dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai sarana tercapainya sumber daya manusia yang unggul.
- b. Nilai yang diangkat pada setiap jenjang pendidikan perlu untuk memiliki sifat berkelanjutan.
- c. Pemerintah dapat tetap mendukung program pemberian beasiswa dari perusahaan.
- d. Pendidikan dapat dipermudah melalui kelas-kelas virtual seperti *e-learning* dan sejenisnya.
- e. Sinergitas antar elemen masyarakat dan institusi yang terlibat perlu menjadi perhatian penting dan dioptimalkan implementasi strategi dan kebijakannya.

Saran

- a. Memformulasikan kebijakan pemerintah yaitu dengan mewujudkan peningkatan kapasitas SDM yang berbasis nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum yang memuat tentang pengembangan literasi.
- b. Strateginya *pertama*; implementasi nilai-nilai karakter yang berfondasikan ideologi Pancasila. *Kedua*; melakukan proses yang integral dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. *Ketiga*; memperkuat sinergitas antar institusi dan pemangku kebijakan dengan seluruh elemen masyarakat.
- c. Kemdikbud / Kemristekdikti dapat memasukkan muatan lokal, kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum.
- d. Kemdikbud, Kemristekdikti, civitas akademika, LSM dan seluruh elemen masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan tersebut dan memonitoring serta evaluasi kebijakan tersebut.
- e. Kemdikbud / Kemristekdikti, civitas akademika, LSM dan seluruh elemen masyarakat, termasuk penggiat literasi melakukan gerakan nasional. Seluruh sivitas akademika dalam proses belajar mengajar memasukkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam setiap silabus pembelajaran dan sekurang-kurangnya 10-15 menit membicarakan tentang Ideologi Pancasila.

Daftar Pustaka

- Dilla, S. (2007). *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Priansa, D. J. (2016). *Perencanaan & Pengembangan SDM*. Jakarta: Alfabeta.
- Silalahi, B. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI.
- Rubin, A. (1998). *Media Literacy*: Editor's note. *Journal of Communication*.
- Rogers, M. E. (2003). *Diffusion of Innovation 5th Edition*. New York: Free Press.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.